

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 /SEOJK.03/2021  
TENTANG  
RENCANA BISNIS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712), selanjutnya disebut POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, diperlukan penyesuaian atas cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis BPRS yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun penyesuaian atas cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis BPRS adalah sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPRS perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat, dan prinsip syariah. Rencana bisnis harus disusun secara realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPRS.

2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPRS dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPRS dalam jangka panjang meliputi visi dan misi BPRS.  
Yang dimaksud dengan “jangka pendek” adalah untuk periode 1 (satu) tahun.  
Yang dimaksud dengan “jangka menengah” adalah untuk periode 3 (tiga) tahun.  
Yang dimaksud dengan “jangka panjang” adalah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Dengan mempertimbangkan kondisi permodalan industri BPRS, jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPRS dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu:
  - a. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
  - b. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
5. Perhitungan hari yang dimaksud dalam POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS terkait penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah hari kalender.
6. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPRS mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi serta hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

## II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Rencana Bisnis paling sedikit memuat:

a. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini paling sedikit memuat visi dan misi BPRS yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, rencana dan langkah strategi yang akan ditempuh oleh BPRS yang dijelaskan untuk periode jangka pendek dan jangka menengah, indikator keuangan utama serta target jangka pendek dan jangka menengah.

b. Strategi Bisnis dan Kebijakan

Bagian ini paling sedikit memuat:

- 1) rencana jangka pendek mengenai analisis posisi BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi, kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPRS, strategi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, dan strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPRS; dan
- 2) rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai arah kebijakan BPRS.

c. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini paling sedikit memuat proyeksi laporan posisi keuangan, proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan, sedangkan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

d. Target Rasio dan Pos Keuangan

Bagian ini paling sedikit memuat target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan target sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan, sedangkan BPRS yang memiliki modal inti

paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan target sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

- e. Rencana Penghimpunan Dana  
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya.
- f. Rencana Penyaluran Dana  
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan, rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha, dan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad.
- g. Rencana Permodalan  
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal disetor, modal sumbangan dan/atau revaluasi aset tetap.
- h. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
- i. Rencana Penerbitan Produk dan Pelaksanaan Aktivitas Baru  
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kategori produk baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- j. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor  
Bagian ini paling sedikit memuat rencana jangka pendek mengenai rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang, rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang, dan rencana perubahan status jaringan kantor.

k. Informasi Lainnya

Bagian ini paling sedikit memuat informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPRS antara lain rencana penghentian kegiatan usaha, produk atau aktivitas yang berdampak material terhadap kinerja keuangan atau profil risiko BPRS, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

2. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat minimum sehingga BPRS dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan butir I.1.
3. Penyusunan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang telah disampaikan oleh BPRS, antara lain:
  - a. target atau program kerja yang disampaikan dalam Rencana Bisnis BPRS dinilai dapat memengaruhi atau membahayakan kelangsungan kegiatan usaha BPRS; dan/atau
  - b. Rencana Bisnis yang disampaikan BPRS belum memuat atau mengakomodasi hal strategis yang ditetapkan karena kebijakan pengaturan perbankan, kebijakan atau program pemerintah, atau hal strategis lain.
2. BPRS dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPRS, sebagai berikut:
  - a. faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga jasa keuangan atau entitas lain, serta perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh:
    - 1) Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebabkan permintaan pembiayaan pada sektor

perdagangan yang menjadi prioritas penyaluran pembiayaan BPRS mengalami penurunan sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar debitur di sektor tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, BPRS dapat mengubah prioritas penyaluran pembiayaan pada sektor lainnya.

- 2) Terdapat peraturan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau program pemerintah terkait dengan kebijakan penyaluran pembiayaan melalui BPRS.
  - 3) Terdapat bencana alam, nonalam, atau sosial yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian sehingga memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan.
- b. faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi. Sebagai contoh:
- 1) BPRS mengalami pemburukan kinerja keuangan yang berakibat pada permasalahan permodalan.
  - 2) Terjadi perubahan kepengurusan dan/atau pengendalian BPRS yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis BPRS.
  - 3) Terdapat rencana penyelenggaraan produk baru yang dapat mendukung pengembangan usaha BPRS namun belum termuat dalam Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPRS.
- c. faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinilai BPRS berdampak material terhadap kegiatan operasional dan/atau kondisi keuangan, yang antara lain tercermin dari laporan keuangan BPRS atau dalam hal memengaruhi kinerja keuangan BPRS.

#### IV. LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan BPRS secara semesteran, yaitu:
  - a. periode Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
  - b. periode Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun selanjutnya.

2. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
  - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi;
  - b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis;
  - c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
  - d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan
  - e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## V. PELAPORAN

1. Tata cara penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. BPRS menyiapkan Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dalam bentuk *text file* (txt) dan/atau *portable document format* (pdf) dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

## VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis.

2. Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VII. KETENTUAN PERALIHAN

Rencana perubahan status jaringan kantor BPRS berupa peningkatan dan/atau penurunan status jaringan kantor dalam format 10.00 Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dilaporkan dalam hal telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

#### VIII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 /SEOJK.03/2021

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN  
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS.....</b>	<b>5</b>
A.	Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi.....	5
1.	Ringkasan Eksekutif .....	5
2.	Strategi Bisnis dan Kebijakan .....	6
3.	Proyeksi Laporan Keuangan .....	8
a.	Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan.....	10
b.	Format Proyeksi Laba Rugi .....	15
c.	Format Proyeksi Rekening Administratif .....	26
4.	Target Rasio dan Pos Keuangan .....	29
5.	Rencana Penghimpunan Dana .....	36
6.	Rencana Penyaluran Dana .....	36
a.	Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Pembiayaan .....	37
b.	Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	38
c.	Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha.....	38
d.	Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad.....	39
7.	Rencana Permodalan .....	41
8.	Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	43
a.	Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar.....	43
b.	Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	44
1)	Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia.....	44
2)	Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.....	44
3)	Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya ...	45
9.	Rencana Penerbitan Produk dan Pelaksanaan Aktivitas Baru .....	46
10.	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor .....	48
11.	Informasi Lainnya .....	49

B.	Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris.....	49
<b>II.</b>	<b>PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS.....</b>	<b>50</b>

## I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

### A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi

Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun, yang paling sedikit memuat:

#### 1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum mengenai ringkasan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPRS yaitu:

##### a. Visi dan Misi BPRS

Visi adalah tujuan yang ingin dicapai BPRS dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Misi adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan dari BPRS.

Visi dan misi BPRS disusun untuk jangka panjang.

##### b. Rencana dan Langkah Strategis yang Akan Ditempuh oleh BPRS

Rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPRS dijelaskan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

##### c. Indikator Keuangan Utama

Indikator keuangan utama paling sedikit memuat penjelasan mengenai kinerja BPRS untuk periode jangka pendek yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

##### d. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Target jangka pendek adalah target kegiatan usaha BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit memuat penurunan *non-performing financing*, peningkatan fungsi intermediasi, peningkatan efisiensi, serta kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPRS.

Target jangka menengah adalah target kegiatan usaha BPRS selama 3 (tiga) tahun ke depan yang paling sedikit memuat upaya penguatan permodalan.

Penyusunan ringkasan eksekutif sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 01.00**  
**Ringkasan Eksekutif**

Nama BPRS :

Alamat :

Kota/Kabupaten :

Kolom	Sandi	Uraian
Visi BPRS	0111	
Misi BPRS	0112	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Pendek	0121	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Menengah	0122	
Indikator Keuangan Utama		
a. Permodalan	0131	
b. Kualitas aset	0132	
c. Rentabilitas	0133	
d. Likuiditas	0134	
e. Lainnya	0139	
Target Jangka Pendek	0141	
Target Jangka Menengah	0142	

2. Strategi Bisnis dan Kebijakan

Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif mengenai:

a. Analisis Posisi BPRS dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi

Analisis posisi BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi dijelaskan untuk periode jangka pendek.

Untuk melakukan analisis posisi, BPRS dapat menggunakan analisis SWOT yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) dalam menghadapi persaingan usaha dengan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain, termasuk BPR dan/atau BPRS lain.

Untuk melakukan analisis posisi dalam persaingan usaha berdasarkan lokasi, BPRS dapat menggunakan batasan wilayah kabupaten, kota, dan/atau provinsi.

b. Arah Kebijakan BPRS

Arah kebijakan BPRS dijelaskan untuk periode jangka pendek dan jangka menengah meliputi informasi umum kebijakan BPRS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPRS di waktu yang akan datang antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPRS, serta arah kebijakan dalam penguatan penerapan prinsip syariah. Termasuk dalam strategi pengembangan bisnis adalah pengembangan teknologi informasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPRS

Kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPRS dijelaskan untuk periode jangka pendek. Penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, termasuk target penilaian penerapan manajemen risiko dan tata kelola.

d. Strategi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Pembiayaan

Bagian ini menguraikan penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai strategi BPRS untuk menghimpun dana dan merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran dan penerimaan, serta sumber penghimpunan dana pihak ketiga dan penghimpunan dana lainnya.

e. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis dan/atau Pemenuhan Ketentuan BPRS

Bagian ini memuat penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai informasi langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang memengaruhi tingkat kesehatan atau status pengawasan BPRS, antara lain langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah atau dapat memengaruhi kinerja atau tingkat kesehatan BPRS. Selain itu bagian ini juga memuat informasi dan langkah strategis BPRS dalam rangka pemenuhan ketentuan BPRS antara lain pemenuhan

modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah dan pemenuhan kewajiban pembentukan satuan kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan strategi bisnis dan kebijakan sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 02.00**

**Strategi Bisnis dan Kebijakan**

<b>Kolom</b>	<b>Sandi</b>	<b>Uraian</b>
Analisis Posisi BPRS dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi	0210	
Arah Kebijakan BPRS	0220	
Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPRS	0230	
Strategi Penghimpunan Dana	0241	
Strategi Penyaluran Pembiayaan	0242	
Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPRS	0251	
Strategi Pemenuhan Ketentuan BPRS	0252	

3. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai proyeksi laporan posisi keuangan, proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. Laporan posisi keuangan, laba rugi, dan rekening administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- a. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.

Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

- b. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Penyusunan proyeksi laporan keuangan sesuai dengan format sebagai berikut:

a. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

**Format 03.10**  
**Proyeksi Laporan Posisi Keuangan**

(dalam satuan rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
<b>ASET</b>							
1. Kas dalam Rupiah	101						
2. Kas dalam Valuta Asing	102						
3. Penempatan pada Bank Indonesia	110						
4. Penempatan pada Bank Lain	120						
5. Piutang	130						
a. Piutang Murabahah	131						
b. Pendapatan Murabahah Ditangguhkan -/- Margin yang	132						
c. Piutang <i>Istishna</i>	141						
d. Pendapatan <i>Istishna</i> Ditangguhkan -/- Margin yang	142						
e. Piutang Multijasa	143						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
f. Pendapatan Multijasa Ditangguhkan -/- Margin yang	144						
g. Piutang <i>Qardh</i>	150						
h. Piutang Sewa	160						
6. Pembiayaan Bagi Hasil	170						
a. Mudarabah	171						
b. Musyarakah	172						
c. Lainnya	173						
7. Pembiayaan Sewa	180						
a. Aset Ijarah	181						
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-	182						
c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	183						
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	190						
a. Umum	191						
b. Khusus	192						
9. Salam	200						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
10. Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian	211						
Termin <i>Istishna</i> -/-	212						
11. Persediaan	220						
12. Agunan yang Diambil Alih	230						
13. Aset Tetap dan Inventaris	241						
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	242						
14. Aset Tidak Berwujud	251						
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	252						
15. Aset Lainnya	270						
<b>Total Aset</b>	<b>290</b>						
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>							
1. Liabilitas Segera	310						
2. Tabungan Wadiah	320						
3. Dana Investasi Nonprofit <i>Sharing</i>	330						
a. Tabungan	331						
b. Deposito	332						
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	340						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
5. Liabilitas kepada Bank Lain	350						
6. Pembiayaan Diterima	360						
7. Liabilitas Lainnya	380						
8. Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	390						
a. Tabungan	391						
b. Deposito	392						
c. Liabilitas kepada bank lain	393						
d. Pembiayaan Diterima	394						
9. Modal Disetor	410						
a. Modal Dasar	411						
b. Modal yang Belum Disetor -/-	412						
10. Perkiraan Tambahan Modal Disetor	420						
a. Agio	421						
b. Disagio -/-	422						
c. Modal Sumbangan	423						
d. Dana Setoran Modal	424						
e. Tambahan Modal Disetor Lainnya	430						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
i. Faktor Penambah	431						
ii. Faktor Pengurang	432						
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	440						
12. Cadangan	450						
a. Umum	451						
b. Tujuan	452						
13. Laba/Rugi	460						
a. Tahun-tahun Lalu	470						
i. Laba	471						
ii. Rugi -/-	472						
b. Tahun Berjalan	480						
i. Laba	481						
ii. Rugi -/-	482						
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>490</b>						

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

<sup>a</sup> bagi BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laporan posisi keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, dan/atau lainnya).

b. Format Proyeksi Laporan Laba Rugi

**Format 03.20**  
**Proyeksi Laporan Laba Rugi**

(dalam satuan rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
<b>I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana</b>	10000						
1. Dari Bank Indonesia	10100						
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	11000						
a. Bonus Wadiah	11100						
i. Giro	11110						
ii. Tabungan	11120						
b. Bagi Hasil	11200						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
i. Giro	11210						
ii. Tabungan	11220						
iii. Deposito	11230						
c. Lainnya	11300						
3. Pembiayaan yang diberikan	12000						
a. Kepada bank lain	12100						
i. Pendapatan Piutang	12110						
a) Murabahah	12111						
b) <i>Istishna</i>	12112						
c) Multijasa	12113						
d) <i>Ujrah</i>	12114						
i. Gadai	12115						
ii. Lainnya	12116						
e) Lainnya	12117						
ii. Pendapatan Bagi Hasil	12120						
a) Mudarabah	12121						
b) Musyarakah	12122						
c) Lainnya	12123						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
iii. Pendapatan Sewa	12130						
a) Pendapatan Ijarah	12131						
b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132						
b. Kepada pihak ketiga bukan bank	12200						
i. Pendapatan Dari Piutang	12210						
a) Murabahah	12211						
b) <i>Istishna</i>	12212						
c) Multijasa	12213						
d) <i>Ujrah</i>	12214						
i. Gadai	12215						
ii. Lainnya	12216						
e) Lainnya	12217						
ii. Pendapatan Bagi Hasil	12220						
a. Mudarabah	12221						
b. Musyarakah	12222						
c. Lainnya	12223						
iii. Pendapatan Sewa	12230						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
a. Pendapatan Ijarah	12231						
b. Penyusutan Aset Ijarah	12232						
iv. Pendapatan Salam	12240						
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	14000						
<b>II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-</b>	15000						
1. <i>Nonprofit Sharing</i>	15100						
a. Kepada Bank Lain	15110						
i. Tabungan	15111						
ii. Deposito	15112						
iii. Pembiayaan diterima	15113						
iv. Lainnya	15114						
b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120						
i. Tabungan	15121						
ii. Deposito	15122						
iii. Pembiayaan diterima	15123						
iv. Lainnya	15124						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
2. Profit Sharing	15200						
a. Kepada Bank Lain	15210						
i. Tabungan	15211						
ii. Deposito	15212						
iii. Pembiayaan diterima	15213						
iv. Lainnya	15214						
b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220						
i. Tabungan	15221						
ii. Deposito	15222						
iii. Pembiayaan diterima	15223						
iv. Lainnya	15224						
<b>III. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (I – II)</b>	19000						
<b>IV. Pendapatan Operasional Lainnya</b>	20000						
1. Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> Dalam Investasi Terikat	21000						
2. Jasa Layanan	22000						
a. Pendapatan <i>fee wakalah</i>	22100						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
b. Pendapatan <i>fee kafalah</i>	22200						
c. Pendapatan jasa lainnya	22300						
3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000						
4. Pemulihan PPAP	24000						
5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000						
6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000						
7. Lainnya	27000						
<b>V. Beban Operasional</b>	30000						
1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100						
2. Bonus Titipan Wadiah	30200						
a. Bank Lain	30210						
b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220						
3. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300						
a. Pembiayaan	30310						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320						
c. Lainnya	30390						
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	30400						
a. Penempatan Pada Bank Lain	30410						
b. Piutang	30420						
i. Piutang Murabahah	30421						
ii. Piutang <i>Istishna</i>	30422						
iii. Piutang Multijasa	30423						
iv. Piutang Sewa	30424						
v. Piutang <i>Qardh</i>	30425						
c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430						
i. Mudarabah	30431						
ii. Musyarakah	30432						
iii. Lainnya	30433						
d. Lainnya	30490						
5. Kerugian Penurunan Nilai Aset lainnya	30500						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
a. Aset Ijarah	30510						
b. Aset Tetap & Inventaris	30520						
c. Aset Tidak Berwujud	30530						
d. Agunan yang Diambil Alih	30540						
e. Persediaan	30550						
6. Penyusutan/Amortisasi	30600						
a. Aset Tetap & Inventaris	30610						
b. Aset Tidak Berwujud	30620						
c. Lainnya	30690						
7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah	30700						
8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800						
9. Kerugian Pelepasan Agunan yang Diambil Alih	30900						
10. Tenaga Kerja	31000						
a. Dewan Komisaris dan DPS	31010						
b. Direksi	31020						
c. Pegawai	31030						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
d. Lainnya	31040						
11. Pendidikan & Pelatihan	31100						
a. Dewan Komisaris dan DPS	31110						
b. Direksi	31120						
c. Pegawai	31130						
d. Lainnya	31140						
12. Penelitian & Pengembangan	31200						
13. Sewa	31300						
14. Pemasaran	31400						
a. Iklan	31410						
b. Lainnya	31420						
15. Barang & Jasa	31500						
a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI)	31510						
b. Lainnya	31520						
16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600						
17. Lainnya	31900						
<b>VI. 1. Laba Operasional</b>	40000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
<b>2. Rugi Operasional</b>	40100						
<b>VII. Pendapatan Nonoperasional</b>	41000						
1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100						
2. Keuntungan Selisih Kurs	41200						
3. Lainnya	41900						
<b>VIII. Beban Nonoperasional</b>	42000						
1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100						
2. Kerugian Selisih Kurs	42200						
3. Lainnya	42900						
<b>IX. 1. Laba Nonoperasional</b>	43000						
<b>2. Rugi Nonoperasional</b>	43100						
<b>X. 1. Laba Tahun Berjalan</b>	44000						
<b>2. Rugi Tahun Berjalan</b>	44100						
<b>XI. Taksiran Pajak Penghasilan</b>	45000						
<b>XII. Pajak Tangguhan</b>	46000						
<b>1. Pendapatan Pajak Tangguhan</b>	46100						
<b>2. Beban Pajak Tangguhan</b>	46200						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
<b>XIII. Zakat</b>	47000						
<b>XIV. Laba/Rugi Bersih</b>	48000						
<b>1. Laba Bersih</b>	48100						
<b>2. Rugi Bersih</b>	48200						

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

<sup>a</sup> bagi BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laba rugi, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, dan/atau lainnya).

c. Format Proyeksi Rekening Administratif

**Format 03.30**  
**Proyeksi Rekening Administratif**

(dalam satuan rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>500</b>						
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	510						
a. Bank	511						
b. Lainnya	512						
2. Lainnya	520						
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>600</b>						
1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	610						
a. Bank	611						
b. Lainnya	612						
2. Lainnya	620						
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>700</b>						
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	710						
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
a. Murabahah	721						
b. <i>Istishna</i>	722						
c. Multijasa	723						
d. Sewa	724						
e. Bagi hasil	725						
f. Lainnya	726						
3. Lainnya	730						
<b>IV. LAINNYA</b>	<b>800</b>						
1. Aset Produktif yang Dihapus Buku	810						
a. Aset Produktif	811						
b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812						
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	820						
3. Penerusan Dana ( <i>Channeling</i> )	830						

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

<sup>a</sup> bagi BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi rekening administratif, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, dan/atau lainnya).

#### 4. Target Rasio dan Pos Keuangan

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan target rasio dan pos keuangan.

Target rasio keuangan pokok antara lain rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Target rasio pos tertentu lainnya antara lain:

- a. rasio pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terhadap total pembiayaan;
- b. rasio dana pendidikan dan pelatihan terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya;
- c. rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap total dana pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan;
- d. rasio Agunan yang Diambil Alih (AYDA) terhadap pembiayaan; dan
- e. rasio realisasi penyelesaian AYDA terhadap AYDA.

Penyusunan target rasio dan pos keuangan sebagai berikut:

- a. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.

Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
  - 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
- b. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:

- 1) posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- 4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Penyusunan proyeksi target rasio dan pos keuangan sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 04.00**

**Target Rasio dan Pos Keuangan**

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
A. Rasio Keuangan Pokok							
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (%) <sup>b</sup>	0411110						
a. Modal (Rp)	0411111						
b. ATMR (Rp)	0411112						
Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (%) <sup>c</sup>	0411120						
a. CAR (X+1)	0411121						
b. CAR (X)	0411122						
Rasio Modal Inti Terhadap Keseluruhan Modal (%) <sup>b</sup>	0411130						
a. Modal Inti (Rp)	0411131						
b. Modal (Rp)	0411132						
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif yang Bermasalah (%) <sup>c</sup>	0411140						
a. Modal Inti (Rp)	0411141						
b. Aset Produktif yang Bermasalah (Rp)	0411142						
Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) (%) <sup>c</sup>	0411210						
a. Aset Produktif yang Diklasifikasikan (Rp)	0411211						
b. Aset Produktif (Rp)	0411212						
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%) <sup>h</sup>	0411220						
a. PPAP (Rp)	0411221						
b. PPAP yang Wajib Dibentuk (Rp)	0411222						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
Rasio NPF Neto (%) <sup>e</sup>	0411230						
a. Pembiayaan yang Bermasalah dikurangi PPAP (Rp)	0411231						
b. Total Pembiayaan (Rp)	0411232						
Rasio NPF Gross (%) <sup>c</sup>	0411240						
a. Pembiayaan yang Bermasalah (Rp)	0411241						
b. Total Pembiayaan (Rp)	0411242						
Rasio Aset yang Menghasilkan Pendapatan (%) <sup>c</sup>	0411250						
a. Aset Produktif dikurangi <i>Nonperforming</i> Aset (Rp)	0411251						
b. Total Aset (Rp)	0411252						
Rasio <i>Net Margin</i> Operasional Utama (%) <sup>c</sup>	0411260						
a. Pendapatan Operasional Utama dikurangi Bagi Hasil Dana Mudarabah dan Biaya Operasional Utama (Rp)	0411261						
b. Aset Produktif (Rp)	0411262						
Rasio <i>Return on Asset</i> (ROA) (%) <sup>c</sup>	0411310						
a. Laba sebelum Pajak (Rp)	0411311						
b. Total Aset (Rp)	0411312						
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) <sup>c</sup>	0411320						
a. Total Beban Operasional (Rp)	0411321						
b. Total Pendapatan Operasional (Rp)	0411322						
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (%) <sup>e</sup>	0411410						
a. Total Pembiayaan (Rp)	0411411						
b. Total Dana Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411412						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
Cash Ratio (CR) (%) <sup>e</sup> a. Aset Likuid (Rp) b. Kewajiban Lancar	0411420 0411421 0411422						
Rasio Short Term Mismatch (STM) (%) <sup>c</sup> a. Aset Lancar 3 (tiga) bulan (Rp) b. Kewajiban Lancar 3 (tiga) bulan (Rp)	0411430 0411431 0411432						
Rasio Net Imbalan (NI) (%) <sup>c</sup> a. Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil dan Bonus b. Rata-Rata Aset Produktif	0411440 0411441 0411442						
Rasio Aset Likuid Terhadap Total Aset (%) <sup>e</sup> a. Aset Likuid (Rp) b. Total Aset (Rp)	0411450 0411451 0411452						
<b>B. Rasio Pos Tertentu Lainnya</b>							
Rasio Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Pembiayaan (%) <sup>f</sup> a. Total Pembiayaan UMKM (Rp) b. Total Pembiayaan (Rp)	0412100 0412110 0412120						
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan							
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (%) <sup>g</sup> a. Total Dana Pendidikan dan Pelatihan (Rp) b. Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (Rp)	0412210 0412211 0412212						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1 <sup>a</sup>	Des X+2 <sup>a</sup>
Rasio Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Dana Pendidikan dan Pelatihan yang Dianggarkan (%) <sup>g</sup>	0412220						
a. Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan (Rp)	0412221						
b. Total Dana Pendidikan dan Pelatihan yang Dianggarkan (Rp)	0412222						
Rasio AYDA terhadap Total Pembiayaan (%) <sup>d</sup>	0412300						
a. AYDA (Rp)	0412310						
b. Total Pembiayaan (Rp)	0412320						
Rasio Realisasi Penyelesaian AYDA terhadap AYDA (%) <sup>h</sup>	0412400						
a. Realisasi Penyelesaian AYDA (Rp)	0412410						
b. AYDA (Rp)	0412420						

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

<sup>a</sup> bagi BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

<sup>b</sup> penjelasan rasio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

<sup>c</sup> penjelasan rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

<sup>d</sup> penjelasan rasio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah.

<sup>e</sup> penjelasan rasio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

- f penjelasan pembiayaan UMKM adalah pembiayaan kepada debitur yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- g penjelasan mengenai dana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- h penjelasan AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan target rasio dan pos keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, dan/atau lainnya).

5. Rencana Penghimpunan Dana

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya, sebagai berikut:

- a. Rencana penghimpunan dana pihak ketiga antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan sumber penghimpunan tabungan dan deposito.
- b. Rencana penghimpunan dana lainnya antara lain informasi mengenai target, strategi penerimaan, dan sumber penerimaan pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman yang tidak berasal dari bank.

Penyusunan rencana penghimpunan dana sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 05.00**

**Rencana Penghimpunan Dana**

<b>Kolom</b>	<b>Sandi</b>	<b>Uraian</b>
Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	0510	
Rencana Penghimpunan Dana Lainnya	0520	

6. Rencana Penyaluran Dana

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan, rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha, dan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad.

Proyeksi Rencana penyaluran dana dijelaskan untuk:

- a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
- c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPRS untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana penyaluran dana paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Pembiayaan

Rencana penyaluran pembiayaan disajikan berdasarkan sektor ekonomi terbesar yaitu paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran pembiayaan terbesar dari total portofolio penyaluran pembiayaan BPRS. Rincian sektor ekonomi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 06.10**

**Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Pembiayaan**

(dalam satuan rupiah)

Sektor Ekonomi	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X
<b>Jumlah</b>				

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan).

b. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Rencana penyaluran pembiayaan disajikan berdasarkan jenis penggunaan yang meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 06.20**

**Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan**

(dalam satuan rupiah)

Jenis Penggunaan	Sandi	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
Modal Kerja	0621				
Investasi	0622				
Konsumsi	0623				
<b>Jumlah</b>	0620				

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi  
(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan).

c. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha  
Pengelompokan jenis usaha yang meliputi usaha UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penyusunan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 06.30**  
**Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan**  
**Jenis Usaha**

(dalam satuan rupiah)

Jenis Usaha	Sandi	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
Usaha Mikro	0631				
Usaha Kecil	0632				
Usaha Menengah	0633				
<b>Jumlah</b>	0630				

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha).

- d. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad  
Rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad disajikan berdasarkan akad yang digunakan untuk pembiayaan BPRS, meliputi piutang (*murabahah*, *istishna'*, *qardh* dan *multijasa*), pembiayaan (*mudarabah*, *musyarakah*, dan lainnya), sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT*) dan *multijasa*.

Penyusunan penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 06.40**

**Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad**

(dalam satuan rupiah)

Jenis Akad	Sandi	Baki Debet Okt (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
A. Piutang	06410				
1. Murabahah	06411				
2. <i>Istishna</i>	06412				
3. Multijasa	06413				
4. <i>Qardh</i>	06414				
B. Pembiayaan	06420				
1. Mudarabah	06421				
2. Musyarakah	06422				
3. Lainnya	06423				
C. Sewa Menyewa	06430				
1. Ijarah	06431				
2. IMBT	06432				
D. Salam	06440				
<b>Jumlah</b>	06400				

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad).

7. Rencana Permodalan

Bagian ini berisi penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal disetor, modal sumbangan, dan/atau revaluasi aset tetap. Termasuk dalam rencana permodalan yaitu strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal.

Rencana permodalan dijelaskan untuk:

- a. posisi aktual akhir bulan Oktober penyusunan Rencana Bisnis;
- b. rencana akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- c. rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- d. rencana akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Penyusunan rencana permodalan sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 07.00**  
**Rencana Permodalan**

Jenis Modal (Sandi) <sup>a</sup>	Nama Pemegang Saham	Kinerja Okt (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1	Des X+2

Keterangan:

X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

<sup>a</sup> Diisi dengan sandi 10 untuk modal disetor, sandi 21 untuk modal sumbangan dan/atau sandi 25 untuk revaluasi aset tetap

Strategi dan Informasi:

(Diisi dengan strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal).

8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

a. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 08.10**

**Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar**

<b>Jenis Rencana (Sandi)<sup>a</sup></b>	<b>Uraian</b>	<b>Alamat</b>

Keterangan:

<sup>a</sup> Diisi dengan sandi:

- 01 untuk perubahan aplikasi inti perbankan;
- 02 untuk perubahan signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan;
- 03 untuk pemindahan pusat data;
- 04 untuk pemindahan pusat pemulihan bencana;
- 05 untuk kerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan/atau
- 06 untuk pengembangan teknologi informasi mendasar lainnya.

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain meliputi rencana rekrutmen sumber daya manusia pada BPRS, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya, sebagai berikut:

1) Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai rencana rekrutmen sumber daya manusia.

Penyusunan rencana rekrutmen sumber daya manusia sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 08.21**

**Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia**

<b>Bidang Tugas (Sandi)<sup>a</sup></b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (Sandi)<sup>b</sup></b>	<b>Jumlah Pegawai yang Direkrut<sup>c</sup></b>	<b>Biaya<sup>d</sup></b>

Keterangan:

- <sup>a</sup> Diisi dengan sandi:  
101 untuk pemasaran;  
102 untuk teknologi informasi;  
103 untuk audit internal;  
104 untuk pembukuan;  
105 untuk layanan nasabah;  
106 untuk kasir;  
107 untuk kepatuhan syariah; dan/atau  
199 untuk lainnya.
- <sup>b</sup> Diisi dengan sandi:  
01 untuk triwulan 1;  
02 untuk triwulan 2;  
03 untuk triwulan 3; atau  
04 untuk triwulan 4.
- <sup>c</sup> Diisi dengan satuan.
- <sup>d</sup> Diisi dengan satuan rupiah.

2) Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan

untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 08.22**  
**Rencana Pendidikan dan Pelatihan**  
**Sumber Daya Manusia**

<b>Bidang atau Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Sandi)<sup>a</sup></b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (Sandi)<sup>b</sup></b>	<b>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Diikutsertakan<sup>c</sup></b>	<b>Biaya dan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan<sup>d</sup></b>

Keterangan:

- <sup>a</sup> Diisi dengan sandi:  
101 untuk sertifikasi Direksi;  
102 untuk sertifikasi Dewan Komisaris;  
103 untuk pembiayaan;  
104 untuk manajemen risiko;  
105 untuk pelatihan teknologi informasi;  
106 untuk pembukuan;  
107 untuk manajemen sumber daya manusia;  
108 untuk sertifikasi ISO;  
109 untuk pelatihan audit;  
110 untuk pelatihan syariah;  
199 untuk lainnya;  
201 untuk pelayanan prima;  
202 untuk *problem solving*;  
203 untuk manajemen waktu;  
204 untuk *leadership*;  
205 untuk *financial planning*; dan/atau  
299 untuk lainnya.
- <sup>b</sup> Diisi dengan sandi:  
01 untuk triwulan 1;  
02 untuk triwulan 2;  
03 untuk triwulan 3; atau  
04 untuk triwulan 4.
- <sup>c</sup> Diisi dengan satuan.
- <sup>d</sup> Diisi dengan satuan rupiah.

3) Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui

perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap.

Penyusunan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 08.23**

**Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya**

<b>Bidang Tugas (Sandi)<sup>a</sup></b>	<b>Alasan Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya<sup>b</sup></b>	<b>Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya</b>	<b>Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya</b>

Keterangan:

- <sup>a</sup> Diisi dengan sandi:  
101 untuk petugas kebersihan;  
102 untuk pesuruh;  
103 untuk penagih utang;  
104 untuk pemasaran;  
105 untuk tenaga pengamanan;  
106 untuk layanan nasabah;  
107 untuk kasir;  
108 untuk teknisi; dan/atau  
199 untuk lainnya.
- <sup>b</sup> Diisi dengan satuan.

9. Rencana Penerbitan Produk dan Pelaksanaan Aktivitas Baru  
Bagian ini berisi penjelasan mengenai rencana pelaksanaan penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru yang dijelaskan untuk periode jangka pendek yang memenuhi kategori produk baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.  
Rencana pelaksanaan kegiatan usaha memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 09.00**

**Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru**

Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Mekanisme Penyelenggaraan (Sandi) <sup>a</sup>	Deskripsi Umum <sup>b</sup>	Waktu Pelaksanaan (Sandi) <sup>c</sup>	Manfaat		Kebutuhan Biaya Investasi		Keterkaitan dengan Strategi Bisnis BPRS	Risiko yang Melekat <sup>d</sup>	Mitigasi Risiko
				Bagi BPRS	Bagi Nasabah	CAPEX	OPEX Tahun Pertama			

Keterangan:

- <sup>a</sup> Diisi dengan sandi:  
01 untuk pelaporan;  
02 untuk persetujuan;  
03 untuk uji coba terbatas; dan/atau  
04 untuk *instant approval*.
- <sup>b</sup> Deskripsi umum mencakup akad yang digunakan dalam produk BPRS.
- <sup>c</sup> Diisi dengan sandi:  
01 untuk triwulan 1;  
02 untuk triwulan 2;  
03 untuk triwulan 3; dan/atau  
04 untuk triwulan 4.
- <sup>d</sup> Penjelasan uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
- Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang, rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang, dan rencana perubahan status jaringan kantor. Penjelasan kantor cabang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

Penyusunan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 10.00**

**Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor**

Jenis Rencana (Sandi) <sup>a</sup>	Jaringan Kantor (Sandi) <sup>b</sup>	Rencana Waktu Pelaksanaan (Sandi) <sup>c</sup>	Perkiraan Investasi/Biaya <sup>d</sup>	Lokasi		Alasan dan Pertimbangan <sup>e</sup>
				Kab/Kota	Alamat Lengkap	

Keterangan:

- <sup>a</sup> Diisi dengan sandi:  
1 untuk pembukaan;  
2 untuk pemindahan alamat;  
3 untuk peningkatan status;  
4 untuk penurunan status; dan/atau  
5 untuk penutupan.
- <sup>b</sup> Diisi dengan sandi:  
1 untuk kantor pusat;  
2 untuk kantor cabang;  
3 untuk kantor kas menjadi kantor cabang; dan/atau  
4 untuk kantor cabang menjadi kantor kas.
- <sup>c</sup> Diisi dengan sandi:  
01 untuk triwulan 1;  
02 untuk triwulan 2;  
03 untuk triwulan 3; dan/atau  
04 untuk triwulan 4.
- <sup>d</sup> Diisi dengan satuan rupiah.
- <sup>e</sup> Penjelasan uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

#### 11. Informasi Lainnya

Bagian ini berisi penjelasan mengenai informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPRS antara lain rencana penghentian kegiatan usaha, produk atau aktivitas yang berdampak material terhadap kinerja keuangan atau profil risiko BPRS, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

Informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis antara lain:

- a. rencana literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat;
- b. rencana penyelenggaraan edukasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan; dan
- c. rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Penyusunan informasi lainnya dilakukan dengan mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada Format 99.00 Informasi Lainnya.

#### B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Direksi wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. BPRS mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada Format 99.01 Lembar Persetujuan Dewan Komisaris.

## **II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS**

Sesuai dengan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS, BPRS wajib menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama. Dalam hal tidak terdapat direktur utama dan komisaris utama, laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS. BPRS mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada Format 01.00 Lembar Pernyataan.

Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis berisi penjelasan secara kualitatif mengenai:

- a. Pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi serta menguraikan fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis, paling sedikit memuat:
  - 1) strategi bisnis dan kebijakan;
  - 2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan;
  - 3) realisasi penghimpunan dana;
  - 4) realisasi penyaluran dana;
  - 5) realisasi permodalan;
  - 6) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia;
  - 7) realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
  - 8) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
  - 9) realisasi informasi lainnya;
- b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis;
- c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
- d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi, termasuk hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif

dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank pembiayaan rakyat syariah; dan

- e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan format sebagai berikut:

**Format 02.00**

**Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis**

<b>Kolom</b>	<b>Sandi</b>	<b>Uraian</b>
a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis paling sedikit: 1) strategi bisnis dan kebijakan; 2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan; 3) realisasi penghimpunan dana; 4) realisasi penyaluran dana; 5) realisasi permodalan; 6) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan SDM; 7) realisasi penerbitan produk dan aktivitas baru; 8) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan 9) realisasi informasi lainnya.	0101 0102  0103 0104 0105 0106  0107 0108  0109	
b. Penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dengan realisasi Rencana Bisnis.	0200	
c. Upaya tindak lanjut untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis: 1) yang telah dilakukan; dan 2) yang akan dilakukan.	0301 0302	
d. Hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi.	0400	
e. Langkah pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis: 1) yang telah ditempuh; dan 2) yang akan ditempuh.	0501 0502	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja